

Analisis Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Anggaran dalam Pencapaian Kinerja Pada Balai POM di Dumai

Anoko Sultan Aldesra Sang Permata¹, Devi Maya Sofa²

¹Program Studi Akuntansi, Universitas Terbuka, Indonesia;

²Program Studi Akuntansi, Universitas Teknologi Surabaya, Indonesia.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja pada Balai POM di Dumai tahun 2022–2025. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan data sekunder berupa laporan keuangan dan laporan kinerja Balai POM di Dumai periode 2022–2025. Teknik analisis data menggunakan rasio efisiensi, rasio efektivitas berdasarkan Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS), serta analisis tren untuk melihat hubungan antara tingkat penyerapan anggaran dan pencapaian kinerja organisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efisiensi penggunaan anggaran mengalami fluktuasi setiap tahun. Realisasi anggaran tertinggi terjadi pada tahun 2023 sebesar 99,99%, sedangkan realisasi terendah terjadi pada tahun 2025 sebesar 24,81% akibat adanya pagu blokir anggaran. Sementara itu, tingkat efektivitas kinerja organisasi berdasarkan nilai NPSS secara konsisten berada pada kategori baik hingga istimewa dengan nilai 97,16 pada tahun 2022, 102,27 pada tahun 2023, 102,15 pada tahun 2024, dan 93,71 pada tahun 2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingginya penyerapan anggaran mampu mendukung pencapaian kinerja organisasi secara optimal, namun rendahnya tingkat penyerapan anggaran tidak selalu menyebabkan penurunan efektivitas kinerja organisasi. Dengan demikian, keberhasilan pengelolaan anggaran tidak hanya ditentukan oleh besarnya realisasi anggaran, tetapi juga oleh kemampuan organisasi dalam mengelola anggaran secara efektif, efisien, dan tepat sasaran untuk mendukung pencapaian target kinerja organisasi.

Kata kunci

Efektivitas; Efisiensi; Kinerja Organisasi; Penyerapan Anggaran; Sektor Publik

Korespondensi

Anoko Sultan Aldesra Sang Permata
anokosultan@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the level of efficiency and effectiveness of budget utilization in achieving organizational performance at the Balai POM di Dumai during the period of 2022–2025. The study employs a descriptive quantitative approach using secondary data obtained from the financial statements and performance reports of Balai POM di

Dumai for the years 2022–2025. Data analysis techniques include efficiency ratio analysis, effectiveness ratio analysis based on the Strategic Target Achievement Score (Nilai Pencapaian Sasaran Strategis/NPSS), and trend analysis to examine the relationship between budget absorption and organizational performance achievement. The results indicate that the efficiency level of budget utilization fluctuated throughout the study period. The highest budget realization was recorded in 2023 at 99.99%, while the lowest realization occurred in 2025 at 24.81% due to a budget allocation freeze. Meanwhile, the effectiveness of organizational performance, as measured by the NPSS, consistently remained within the good to excellent category, with scores of 97.16 in 2022, 102.27 in 2023, 102.15 in 2024, and 93.71 in 2025. The findings suggest that a high level of budget absorption can support the optimal achievement of organizational performance. However, a low level of budget absorption does not necessarily lead to a decline in organizational performance effectiveness. Therefore, successful budget management is determined not only by the magnitude of budget realization but also by the organization's ability to manage its budget effectively, efficiently, and in a targeted manner to support the achievement of organizational performance objectives.

Keywords

Effectiveness; Efficiency; Organizational Performance; Budget Absorption; Public Sector

Pendahuluan

Pengelolaan anggaran di sektor publik merupakan aspek krusial dalam mencapai tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya dalam hal akuntabilitas, transparansi, efisiensi, dan efektivitas penggunaan anggaran negara. Anggaran dipandang sebagai lebih dari sekadar alat untuk perencanaan dan pengendalian; itu juga berfungsi sebagai alat untuk memenuhi target kinerja organisasi. Konsistensi dan kontinuitas menjadi prinsip penting dalam pengelolaan keuangan sektor publik untuk memastikan bahwa informasi keuangan yang disajikan tetap, dapat diandalkan dan dapat dibandingkan dari tahun ke tahun. Penerapan prinsip tersebut membantu menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan sektor publik sehingga pengelolaan dana publik dapat berlangsung secara efisien dan efektif (Purwati et al., 2023).

Sistem penganggaran berbasis kinerja atau *performance-based budgeting* hadir sebagai wujud reformasi dalam tata kelola anggaran negara. Melalui pendekatan tersebut alokasi dana publik wajib memiliki keterkaitan yang sesuai dengan sasaran strategis instansi sehingga seluruh agenda kerja memiliki tolak ukur hasil (output) serta dampak (outcome) yang dapat diukur. Orientasi dari model penganggaran ini adalah memacu mutu kemanfaatan anggaran agar dana masyarakat yang dialokasikan benar-benar merepresentasikan ketercapaian target lembaga secara tepat. Pendekatan ini sekaligus memotivasi lembaga agar tidak sekadar berfokus pada kuantitas realisasi penggunaan anggaran melainkan pada mutu dari capaian riil yang diraih melalui pemanfaatan anggaran tersebut (Handayani et al., 2022).

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa penyerapan dana yang besar belum selalu berarti tata kelola finansial yang tepat. Angka realisasi yang tinggi tidak selalu didokumentasikan bersamaan dengan capaian program yang ideal, yang menyebabkan pengelolaan dana organisasi menjadi kurang efektif. Ini menunjukkan bahwa ukuran keberhasilan manajemen anggaran harus dilihat bukan hanya dari jumlah dana yang diterima, tetapi juga tingkat keberhasilan organisasi dalam melaksanakan program dan rencana yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, menghitung tingkat kemanfaatan dan keberhasilan alokasi dana sangat penting karena dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang kualitas manajemen anggaran lembaga publik (Maulana, 2025).

Sayangnya aktivitas manajerial keuangan sektor publik dalam realitasnya masih kerap membentur beragam hambatan dan rintangan. Kompleksitas isu tersebut mencakup rendahnya mutu perencanaan anggaran serta ketidaktepatan dalam penempatan belanja negara dan lemahnya fungsi supervisi sekaligus akselerasi penyerapan dana yang cenderung menumpuk secara masif pada fase akhir tahun anggaran. Fenomena kelolaan yang kurang ideal ini mengisyaratkan bahwa mekanisme penyerapan anggaran institusi pemerintah masih memerlukan proses telaah

sekaligus perbaikan secara terus-menerus. Di samping itu pola penumpukan realisasi dana di akhir tahun berisiko memicu eksekusi program menjadi kurang maksimal sehingga berimbas negatif terhadap mutu output serta *outcome* yang dihasilkan oleh instansi pemerintah. Problematika ini pada akhirnya mendistorsi efisiensi penggunaan modal anggaran serta menghambat pemenuhan target lembaga secara optimal (Kholifaturrahmah et al., 2023).

Apabila ditelaah secara mendasar tata kelola anggaran pada ranah publik memuat karakteristik yang berbeda dengan sektor komersial karena orientasi fundamental institusi birokrasi bukan demi mengakumulasi keuntungan melainkan demi menyajikan pelayanan prima bagi masyarakat sekaligus memformulasikan kesejahteraan sosial. Atas dasar karakteristik tersebut maka setiap pemanfaatan dana publik wajib dipertanggungjawabkan baik dari aspek regulasi administratif maupun dari aspek capaian riil. Konsekuensinya penilaian atas penggunaan anggaran tidak boleh hanya bertumpu pada indikator kuantitas penyerapan dana melainkan harus ditinjau dari kapasitas instansi dalam memproduksi output serta *outcome* yang selaras dengan target yang diproyeksikan. Manakala pengelolaan keuangan negara tidak diselenggarakan secara tepat maka hal itu berpotensi menurunkan mutu pelayanan kepada masyarakat luas serta menghambat efektivitas agenda kerja yang telah dirancang (Fitri et al., 2023).

Tantangan ini semakin menguat pada era pascapandemi COVID-19 yang memaksa otoritas pemerintahan untuk mengimplementasikan restrukturisasi kebijakan fiskal sekaligus penghematan anggaran di berbagai lini. Regulasi tersebut membawa konsekuensi bagi lembaga birokrasi yang dituntut untuk tetap prima dalam mengeksekusi program kerja sekaligus memenuhi sasaran kinerja organisasi di tengah impitan keterbatasan finansial. Fenomena ini membuktikan bahwa parameter kesuksesan pengelolaan dana saat ini tidak lagi dikonstruksikan berdasarkan tingginya angka realisasi belanja melainkan dari kemampuan instansi dalam mendayagunakan sumber daya yang terbatas demi melahirkan kinerja yang paling optimal. Implikasinya pemanfaatan anggaran negara wajib berpegang teguh pada doktrin *value for money* agar setiap satuan dana yang dibelanjakan mampu mendatangkan hasil yang maksimal melalui penerapan prinsip ekonomi dan efisiensi serta efektivitas pada setiap pelaksanaan program nasional (Bagiana, 2023).

Sejauh ini kajian ilmiah mengenai tingkat kedayagunaan serta keberhasilan alokasi dana telah jamak dilakukan oleh para peneliti terdahulu pada ragam instansi pemerintah. Konklusi dari beberapa literatur mengonfirmasi bahwa instrumen analisis efisiensi serta efektivitas sangat relevan dimanfaatkan untuk menguji mutu implementasi anggaran sekaligus mengukur derajat kesuksesan tata kelola keuangan negara (Jarkasih, 2022). Namun di sisi lain riset juga menunjukkan bahwa mayoritas formulasi penilaian kinerja keuangan masih tersentralisasi pada aspek kuantitas penyerapan pagu anggaran sehingga instrumen tersebut belum sepenuhnya mampu memotret mutu pemanfaatan anggaran dalam merealisasikan sasaran strategis lembaga (Mulyandani & Oktaviani, 2022). Padahal dinamika saat ini dalam pengelolaan keuangan negara memperlihatkan adanya transformasi fundamental dari paradigma yang berbasis penyerapan dana menuju paradigma yang berbasis pada hasil akhir atau *performance-based budgeting* di mana parameter kesuksesan eksekusi anggaran tidak lagi dinilai dari penyerapan dana melainkan dari keberhasilan capaian riil yang diperoleh instansi (Darmawan et al., 2025).

Meskipun pembahasan ini terus berkembang namun kajian empiris yang membahas tingkat efektivitas serta efisiensi pemanfaatan anggaran pada instansi vertikal pemerintah dinilai masih sangat terbatas karena mayoritas literatur terdahulu hanya berfokus pada aspek realisasi dana tanpa mengorelasikannya dengan capaian kinerja riil organisasi. Padahal kuantitas penyerapan anggaran yang tinggi sama sekali tidak mencerminkan tata kelola keuangan yang bermanfaat jika tidak diiringi dengan keluaran output serta *outcome* yang maksimal. Balai POM di Dumai sebagai representasi dari instansi vertikal pemerintah memegang fungsi yang sangat strategis dalam ranah pengawasan obat dan makanan sehingga membutuhkan tata kelola belanja negara yang tepat sasaran demi mengakselerasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga. Atas dasar urgensi tersebut maka agenda evaluasi atas pemanfaatan anggaran untuk kurun waktu tahun 2022 hingga tahun 2025 menjadi sangat krusial demi memetakan sejauh mana alokasi dana mampu menyokong pemenuhan target kinerja organisasi secara maksimal.

Nilai kebaruan ilmiah (*novelty*) dari penelitian ini terletak pada fokus lokus akademis yang diarahkan pada Balai POM di Dumai sebagai satuan kerja vertikal yang sejauh ini masih minim dieksplorasi dalam konteks kajian efektivitas

serta efisiensi penggunaan anggaran. Studi ini mengaplikasikan basis data *time series* dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2025 dengan tujuan menyajikan proyeksi komprehensif mengenai tren pemanfaatan dana sekaligus dinamika capaian kinerja lembaga. Riset ini juga menyinergikan instrumen analisis efektivitas sekaligus efisiensi ke dalam satu pembahasan terpadu demi mendeteksi korelasi antara kuantitas penyerapan dana dan pemenuhan target kinerja lembaga. Bersandarkan pada seluruh argumentasi yang telah dipaparkan maka agenda penelitian ini diselenggarakan dengan tujuan untuk mengukur tingkat efisiensi pemanfaatan anggaran di Balai POM di Dumai tahun 2022–2025 serta mengukur tingkat efektivitas penggunaan anggaran dalam memenuhi target kinerja institusi sekaligus mendeteksi hubungan antara kuantitas penyerapan anggaran dan pemenuhan kinerja organisasi pada Balai POM di Dumai.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Fokus pelaksanaan riset ini berada pada Balai POM di Dumai yang berkedudukan secara administratif di wilayah Kota Dumai di dalam area Provinsi Riau. Agenda pengumpulan data serta observasi dijadwalkan berlangsung selama kurun waktu 3 (tiga) bulan penuh yang terhitung mulai dari bulan April hingga bulan Juni pada tahun 2026. Data yang digunakan dalam studi ini merupakan jenis data sekunder yang bersumber langsung dari Laporan Keuangan sekaligus Laporan Kinerja instansi Balai POM di Dumai untuk periode tahun 2022 sampai dengan tahun 2025. Terkait dengan mekanisme penghimpunan data peneliti mengaplikasikan teknik studi dokumentasi melalui aktivitas pengumpulan serta pengolahan berkas-berkas resmi yang merekam pemanfaatan anggaran dan realisasi capaian kinerja pada lembaga vertikal tersebut.

Mengenai instrumen pemrosesan data peneliti menerapkan teknik analisis data yang bertumpu pada kalkulasi rasio efisiensi serta rasio efektivitas dan dilengkapi dengan analisis tren demi melihat proyeksi perkembangan anggaran. Adapun orientasi metodologis yang diterapkan dalam kajian ini bersandar pada pendekatan kuantitatif karena studi ini menitikberatkan fokusnya pada proses pengukuran tingkat kedayagunaan serta keberhasilan alokasi dana menggunakan data berbasis angka atau numerik. Di samping itu peneliti juga memadukannya dengan metode deskriptif yang bertujuan untuk menyajikan potret serta memaparkan potret riil mengenai dinamika penyerapan anggaran publik sekaligus pemenuhan target capaian pada instansi Balai POM di Dumai secara terstruktur dan teratur (Sugiyono, 2023). Rasio efisiensi digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi penggunaan anggaran dengan membandingkan realisasi anggaran terhadap anggaran yang ditetapkan, menggunakan rumus:

$$Efisiensi = \frac{Realisasi\ Anggaran}{Anggaran} \times 100\%$$

Tabel 1. Kriteria Efisiensi Belanja

Kriteria Efisiensi Belanja	Persentase (%)
Sangat Efisien	< 60 %
Efisien	60-80%
Cukup Efisien	80-90%
Kurang Efisien	90-100%
Tidak Efisien	>100%

Sumber: Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996

Sedangkan rasio efektivitas digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian target kinerja dihitung menggunakan NPSS. NPSS merupakan nilai kinerja organisasi yang menunjukkan hasil konsolidasi dari seluruh nilai perspektif atau seluruh realisasi indikator kinerja dalam satu Peta Strategi (Badan POM RI, 2025). NPSS digunakan untuk menilai kinerja unit/satuan kerja yang memiliki peta strategi. Formula menghitung NPSS:

$$Efektivitas (NPSS) = \frac{\sum \text{Nilai Perspektif}}{\sum \text{Perspektif}}$$

Dengan prediket kinerja organisasi mengacu pada kriteria NPSS sesuai dengan Tabel Berikut:

Tabel 2. Kriteria Efektivitas Belanja

Predikat	NPSS
Istimewa	>100
Baik	$90 \leq \text{NPSS} \leq 100$
Butuh Perbaikan	$70 \leq \text{NPSS} \leq 90$
Kurang	$50 \leq \text{NPSS} \leq 70$
Sangat Kurang	<50

Sumber: Kepka Badan POM RI Nomor 83 Tahun 2025

Selain itu, analisis tren digunakan untuk melihat pola peningkatan atau penurunan penggunaan anggaran dan pencapaian kinerja selama periode 2022–2025 secara berkelanjutan. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan penggunaan anggaran dari tahun ke tahun serta mengidentifikasi keterkaitannya dengan tingkat pencapaian target kinerja organisasi pada setiap periode pengamatan.

Hasil dan Pembahasan

Balai POM di Dumai merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan POM. Balai POM di Dumai memiliki peranan penting sebagai perpanjangan tangan Badan POM di Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis, dan Kabupaten Rokan Hilir, yaitu melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang diselenggarakan oleh Balai POM di Dumai merupakan suatu proses yang komprehensif mencakup pengawasan *pre-market* dan *post-market*. (Balai POM di Dumai, 2026).

Analisis Tingkat Efisiensi Anggaran Belanja

Orientasi utama dari pelaksanaan komparasi ini adalah demi memotret sejauh mana pagu anggaran yang telah ditetapkan mampu diimplementasikan secara riil guna menyokong eksekusi agenda kerja serta program strategis lembaga. Oleh karena itu data hasil kalkulasi mengenai derajat kedayagunaan anggaran tersebut dipaparkan secara terperinci di dalam tabulasi berikut ini. Semua ini dilakukan dalam rangka mengukur derajat efisiensi pemanfaatan dana publik pada instansi Balai POM di Dumai melalui instrumen analisis yang mempertemukan antara target perencanaan fiskal dan angka realisasi belanja operasional selama kurun waktu tahun 2022 hingga tahun 2025.

Tabel 3. Target Anggaran dan Realisasi Anggaran Belanja

Tahun	Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase
2022	5.091.155.000	4.706.012.735	92,46
2023	4.549.521.000	4.549.476.765	99,99
2024	6.719.731.000	5.868.513.628	87,33
2025	15.963.358.000	3.960.226.602	24,81

Sumber : Laporan Keuangan Balai POM di Dumai, data diolah 2026

Fakta empiris dari riset ini mengonfirmasi landasan teoritis *Value for Money* (VfM) menggarisbawahi bahwa kebermanfaatan alokasi dana berkaitan erat dengan kapasitas instansi dalam mendayagunakan belanja secara ideal demi memproduksi keluaran (output) serta mewujudkan sasaran strategis yang telah dicanangkan

(Judijanto & Afandy, 2024). Di dalam perspektif tersebut aspek efisiensi merepresentasikan korelasi antara masukan (input) dan keluaran (output) di mana institusi diwajibkan mampu memformulasikan hasil yang optimal melalui pemanfaatan belanja yang seminimal mungkin tanpa menghilangkan mutu capaian akhir. Dalam konteks ini hasil pengelolaan anggaran Balai POM di Dumai memperlihatkan dinamika yang fluktuatif akibat stimulasi transformasi regulasi anggaran serta kebijakan pemblokiran dana yang mengintervensi angka realisasi belanja pada tiap periode. Namun secara umum eksekusi target kerja harus tetap dapat terselenggara berdasarkan pada skala prioritas yang telah ditetapkan.

Jika dievaluasi secara menyeluruh dinamika target serta realisasi keuangan Balai POM di Dumai sepanjang rentang waktu tahun 2022 sampai dengan tahun 2025 memaparkan data bahwa kuantitas penyerapan anggaran mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Rasio realisasi belanja tertinggi terdokumentasi pada tahun 2023 dengan raihan angka persentase menyentuh 99,99% sedangkan kuantitas realisasi paling rendah dijumpai pada tahun 2025 yaitu hanya sebesar 24,81%. Kesenjangan angka realisasi yang mencolok tersebut membuktikan bahwa implementasi anggaran dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor internal seperti kualitas perencanaan dan ketepatan eksekusi program maupun dari faktor eksternal berupa kebijakan pemblokiran pagu oleh pemerintah pusat. Di dalam ekosistem tata kelola keuangan sektor publik institusi pemerintah pada prinsipnya dituntut untuk sanggup menyerap anggaran mendekati angka 100% agar seluruh agenda kerja dapat diimplementasikan secara maksimal sehingga walaupun secara teoritis angka persentase tertentu diklasifikasikan efisien berdasarkan parameter rasio belanja namun dalam ranah praktis pemerintahan tingkat penyerapan yang belum maksimal tetap mengindikasikan bahwa pemanfaatan dana belum berjalan secara sepenuhnya optimal.

Sementara itu pada tahun 2022 angka realisasi belanja menyentuh 92,46% yang menempatkannya ke dalam kelompok kurang efisien namun mayoritas program kerja beserta aktivitas lembaga tetap dapat dieksekusi dengan baik meskipun dibayangi oleh kebijakan pemblokiran pagu anggaran. Fenomena tersebut merefleksikan bahwa penyerapan dana masih sanggup mengawal ketercapaian target institusi pada derajat yang relatif ideal.

Keadaan yang kontras terjadi pada tahun 2025 di mana realisasi belanja hanya berada pada angka 24,81% sehingga dikategorikan sangat efisien jika diukur semata-mata menggunakan instrumen rasio efisiensi belanja. Rendahnya kuantitas penyerapan tersebut sejatinya lebih didominasi oleh kebijakan pemblokiran anggaran serta kontrol ketat anggaran dari otoritas pusat dan bukan mencerminkan kelemahan manajerial internal dari organisasi terkait. Dengan anggaran yang serbaterbatas Balai POM di Dumai tetap berkomitmen menyelenggarakan program kerja sekaligus aktivitas prioritas sesuai dengan batas kemampuan dana yang tersedia.

Berbeda halnya dengan kondisi pada tahun 2023 di mana realisasi anggaran sukses menyentuh angka 99,99% yang mengindikasikan bahwa hampir seluruh instrumen dana berhasil diimplementasikan secara sempurna demi menyukseskan pelaksanaan agenda kerja organisasi. Tingginya kuantitas penyerapan modal tersebut mencerminkan bahwa mekanisme perencanaan serta pelaksanaan dan supervisi anggaran berjalan dengan sangat ideal sehingga sasaran program dapat diwujudkan secara maksimal tanpa terkendala oleh pemotongan pagu dana.

Melompat pada kurun waktu tahun 2024 tergambar angka realisasi belanja sebesar 87,33% sehingga dikelompokkan ke dalam kriteria cukup efisien. Kendati kuantitas penyerapan anggaran tersebut mengalami penyusutan sebagai implikasi dari adanya instrumen pemblokiran pagu namun implementasi program kerja beserta program strategis tetap dapat berjalan selaras dengan skala prioritas yang telah ditargetkan. Realitas ini membuktikan bahwa pemanfaatan anggaran belanja masih sanggup menyokong pelaksanaan tugas pokok sekaligus fungsi kelembagaan secara ideal.

Temuan ilmiah ini pun turut memperkuat konklusi dari riset terdahulu yang dipublikasikan oleh (Kholifaturrahmah et al., 2023) yang menegaskan bahwa derajat kedayagunaan pemanfaatan dana pada lembaga pemerintah dipengaruhi oleh mutu implementasi program serta iklim tata kelola anggaran pada tahun berjalan.

Selaras dengan pandangan tersebut hasil kajian dari (Maulana, 2025) memaparkan bahwa minimnya angka realisasi belanja tidak dapat serta-merta diklaim sebagai bentuk buruknya manajerial finansial karena fenomena tersebut kerap diintervensi oleh faktor regulasi dan kontrol anggaran dari pemerintah pusat. Ditambah lagi riset dari (Mulyandani & Oktaviani, 2022) juga memperlihatkan bahwa kuantitas penyerapan dana pada institusi publik sering kali mengalami pasang surut akibat benturan kendala administratif serta transformasi kebijakan dan dinamika proses eksekusi program lapangan. Melalui paparan komparatif tersebut maka hasil observasi pada Balai POM di Dumai ini memperkuat khazanah penelitian terdahulu bahwa konsep analisis efisiensi penggunaan anggaran wajib melibatkan kalkulasi kondisi objektif di lapangan serta integrasi faktor internal dan eksternal yang mengintervensi angka realisasi pada setiap tahun anggaran.

Analisis Tingkat Efektivitas

Data hasil kalkulasi mengenai derajat keberhasilan performa institusi tersebut dipaparkan secara terperinci di dalam tabulasi berikut ini. Di samping melakukan kalkulasi terhadap aspek anggaran peneliti juga melakukan pengukuran terhadap tingkat efektivitas capaian kerja pada Balai POM di Dumai dengan menerapkan instrumen indikator Nilai NPSS sepanjang kurun waktu tahun 2022 sampai dengan tahun 2025. Proses evaluasi atas dimensi keberhasilan ini diselenggarakan dengan tujuan untuk mendeteksi sejauh mana pemanfaatan instrumen modal finansial sanggup mengawal sekaligus menyokong pemenuhan target serta sasaran strategis organisasi secara paripurna.

Tabel 4. Tingkat Efektivitas Kinerja

Tahun	Nilai NPSS	Predikat
2022	97,16	Baik
2023	102,27	Istimewa
2024	102,15	Istimewa
2025	93,71	Baik

Sumber : Laporan Kinerja Balai POM di Dumai, data diolah 2026

Apabila dievaluasi secara menyeluruh temuan ilmiah mengenai dimensi keberhasilan ini selaras dengan pilar teori penganggaran berbasis kinerja atau *performance-based budgeting* yang menggarisbawahi bahwa pemanfaatan dana publik wajib dikonsentrasikan pada perwujudan hasil serta kemanfaatan dan pemenuhan sasaran strategis lembaga. Di dalam konstruksi teori tersebut dipaparkan bahwa efektivitas finansial tidak boleh ditakar semata-mata dari besaran realisasi belanja melainkan harus ditinjau dari kapabilitas institusi dalam menghasilkan output dan *outcome* yang telah direncanakan sebelumnya. Fakta yang terdokumentasi pada Balai POM di Dumai membuktikan bahwa walaupun pada beberapa tahun anggaran terjadi kontraksi penyerapan dana sebagai dampak dari regulasi pemblokiran pagu anggaran namun pencapaian kuantitas skor NPSS organisasi secara konsisten bertahan pada kualifikasi baik serta istimewa. Fenomena tersebut mencerminkan bahwa lembaga sanggup mendayagunakan instrumen anggaran sekaligus sumber daya yang tersedia secara presisi dan tepat sasaran untuk menyokong ketercapaian kinerja kelembagaan secara maksimal.

Capaian pada periode tahun 2022 menunjukkan perolehan angka NPSS sebesar 97,16 yang menempatkannya pada predikat baik. Realisasi tersebut menjadi bukti bahwa mayoritas sasaran strategis institusi berhasil diwujudkan dengan paripurna walaupun rasio penyerapan anggaran belum sanggup menyentuh angka 100%. Hal ini mengindikasikan bahwa pemanfaatan instrumen dana tetap memiliki daya dukung yang kuat dalam mengawal implementasi program serta agenda kerja organisasi secara berdayaguna.

Berlanjut pada tahun 2023 kuantitas angka NPSS mengalami eskalasi yang positif hingga menyentuh poin 102,27 dengan kepemilikan predikat istimewa. Temuan kuantitatif tersebut mengindikasikan bahwa alokasi anggaran sanggup mengawal pemenuhan performa institusi secara sangat ideal bahkan berhasil melampaui sasaran strategis yang telah diproyeksikan sebelumnya. Di samping itu realitas ini juga mencerminkan bahwa internalisasi sistem penganggaran yang berbasis pada hasil kerja telah terselenggara dengan sangat baik.

Menoleh pada perolehan data di tahun 2024 performa kelembagaan kembali merekam capaian yang sangat memuaskan dengan raihan skor NPSS menyentuh angka 102,15 serta tetap bertahan pada kualifikasi istimewa. Walaupun terdapat hambatan berupa regulasi pemblokiran pagu anggaran yang mengintervensi kuantitas realisasi belanja operasional namun institusi terbukti tetap mampu dalam mengeksekusi segenap agenda kerja prioritas sekaligus memelihara konsistensi pemenuhan sasaran kinerja secara maksimal.

Sedangkan pada tahun 2025 perolehan skor NPSS terdokumentasi berada pada angka 93,71 dengan kepemilikan predikat baik. Meskipun data ini memperlihatkan adanya penyusutan jika dikomparasikan dengan periode tahun sebelumnya sebagai imbas dari keterbatasan pemanfaatan pagu dana serta stimulasi kebijakan pemblokiran anggaran namun sebagian besar target performa organisasi terpantau tetap dapat direalisasikan secara memadai sehingga efektivitas dalam penyelenggaraan tugas pokok sekaligus fungsi kelembagaan terpelihara secara stabil.

Riset empiris ini pun sejalan dengan konklusi ilmiah yang dipublikasikan oleh (Cahyani et al., 2025) yang mengonfirmasi bahwa instrumen kalkulasi atas efektivitas serta efisiensi anggaran sangat dibutuhkan guna menguji derajat kesuksesan lembaga publik dalam mewujudkan sasaran kinerja organisasi. Selaras dengan bahwa implementasi premis tersebut hasil penelitian dari (Dhamara & Fauzi, 2023) juga menegaskan model penganggaran berbasis kinerja sanggup meningkatkan mutu pemenuhan capaian organisasi karena alokasi dana secara spesifik ditujukan pada hasil dari suatu program kerja. Melalui komparasi literatur ini maka temuan yang diperoleh pada Balai POM di Dumai semakin memperkuat khazanah penelitian terdahulu bahwa derajat keberhasilan pemanfaatan anggaran sangat diintervensi oleh kapabilitas internal organisasi dalam menata kelola modal finansial secara tepat guna demi mengawal ketercapaian target performa kelembagaan.

Secara makro hasil analisis terhadap dimensi keberhasilan ini membuktikan bahwa pengoperasian anggaran pada Balai POM di Dumai sepanjang rentang waktu tahun 2022 hingga tahun 2025 telah sanggup mengawal pemenuhan target kinerja organisasi secara berdayaguna. Konklusi tersebut tercermin secara gamblang dari kuantitas skor NPSS yang secara kontinu berada pada rentang kelompok baik serta istimewa sepanjang periode observasi dilakukan. Tingginya derajat efektivitas ini mengindikasikan bahwa orientasi pemanfaatan anggaran tidak lagi terjebak pada kuantitas penyerapan modal semata melainkan telah mampu melahirkan output dan outcome yang nyata demi menyokong pencapaian visi institusi. Selain itu data tersebut memberikan sinyal positif bahwa Balai POM di Dumai memiliki kompetensi yang mumpuni dalam menata kelola pagu anggaran beserta seluruh elemen daya organisasi untuk mengawal pelaksanaan tugas bidang supervisi obat sekaligus makanan secara ideal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa alokasi anggaran pada Balai POM di Dumai telah dioperasikan secara efektif karena terbukti sanggup menyokong ketercapaian target performa lembaga meskipun pada beberapa tahun anggaran sempat didera impitan keterbatasan dana yang dipicu oleh regulasi pemblokiran anggaran.

Hubungan Antara Penyerapan Anggaran dan Pencapaian Kinerja Organisasi

Jika ditinjau pada periode tahun 2024 kenyataan di lapangan membuktikan bahwa tingginya pemenuhan capaian performa tidak selalu memiliki ketergantungan mutlak pada besaran kuantitas penyerapan pagu. Fenomena ini terbukti saat realisasi belanja mengalami kontraksi hingga menyusut ke angka 87,33% sebagai akibat dari adanya regulasi pemblokiran pagu anggaran namun kuantitas skor NPSS instansi secara mengagumkan tetap bertahan pada kualifikasi istimewa yaitu menyentuh poin 102,15. Realitas numerik tersebut memberikan bukti empiris bahwa organisasi memiliki ketangkasan dalam mendayagunakan alokasi dana yang tersedia secara presisi serta tepat sasaran sekaligus tetap konsisten memelihara efektivitas eksekusi atas agenda kerja yang bersifat prioritas.

Melompat pada perolehan data di tahun 2025 kuantitas penyerapan pagu terpantau merosot secara tajam hingga menyentuh angka 24,81% meskipun perolehan skor NPSS lembaga tercatat masih sanggup bertahan pada kualifikasi baik yaitu sebesar 93,71. Pola penganggaran ini merepresentasikan bahwa faktor keterbatasan dana tidak serta-merta menekan mutu kinerja kelembagaan secara keseluruhan karena Balai POM di Dumai terbukti tetap andal dalam menyelenggarakan seluruh program prioritas secara berdayaguna. Melalui serangkaian fakta tersebut maka benang merah antara penyerapan modal fiskal dan pemenuhan performa institusi sejatinya bersifat saling mengikat serta berkolerasi namun parameter kesuksesan capaian tidak semata-mata diintervensi oleh kuantitas angka realisasi belanja melainkan amat ditentukan oleh kompetensi internal instansi dalam menata kelola anggaran secara efektif sekaligus efisien dan tepat sasaran.

Secara umum potret empiris dari riset ini mengonfirmasi adanya korelasi yang nyata antara derajat penyerapan anggaran dan pemenuhan capaian performa kelembagaan pada instansi Balai POM di Dumai sepanjang kurun waktu tahun 2022 sampai dengan tahun 2025. Tingginya angka realisasi pembelanjaan dana publik pada tahun 2022 serta tahun 2023 terpantau beriringan secara linier dengan perolehan skor NPSS yang secara konsisten bertengger pada rentang kelompok baik hingga istimewa. Kondisi objektif tersebut mencerminkan bahwa pengoperasian instrumen anggaran yang maksimal sanggup mengawal pelaksanaan agenda kerja serta aktivitas institusi sehingga sasaran kinerja yang diproyeksikan dapat diwujudkan secara sempurna.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis tingkat efisiensi penggunaan anggaran dan efektivitas kinerja Pada tahun 2022 serta tahun 2023 angka realisasi pembelanjaan dana publik yang masif masing-masing menyentuh 92,46% dan 99,99% terpantau sanggup mengawal pemenuhan capaian performa dengan kepemilikan predikat baik hingga istimewa. Kondisi objektif tersebut mencerminkan bahwa optimalnya pengoperasian instrumen finansial memiliki kontribusi yang positif terhadap maksimalnya perwujudan sasaran kinerja organisasi.

Sementara itu jika ditelaah pada periode tahun 2024 realisasi pembelanjaan terpantau menyusut ke angka 87,33% sebagai akibat dari adanya regulasi pemblokiran pagu anggaran namun kuantitas skor NPSS organisasi secara mengagumkan tetap bertahan pada rentang kelompok istimewa yaitu menyentuh poin 102,15. Berlanjut pada tahun 2025 angka penyerapan modal finansial kembali merosot hingga berada pada level 24,81% walakin perolehan skor NPSS lembaga tercatat sebesar 93,71 dan masih sanggup bertahan pada kualifikasi baik. Dinamika penganggaran ini mencerminkan bahwa institusi terbukti tetap andal dalam mempertahankan pemenuhan target kinerja organisasi meskipun di tengah situasi penurunan pemanfaatan instrumen anggaran belanja.

Bersandarkan pada data hasil observasi untuk kurun waktu tahun 2022 sampai dengan tahun 2025 diperoleh konklusi bahwa derajat kedayagunaan penggunaan anggaran beserta efektivitas kinerja kelembagaan pada Balai POM di Dumai memperlihatkan kecenderungan yang fluktuatif. Secara makro temuan ilmiah dari riset ini memberikan pembuktian bahwa parameter kesuksesan tata kelola keuangan tidak semata-mata diintervensi oleh tingginya kuantitas penyerapan pagu anggaran melainkan amat ditentukan oleh kompetensi institusi dalam mengolah anggaran secara berdaya guna dan tepat sasaran demi mewujudkan sasaran strategis. Dengan demikian, keberhasilan pencapaian kinerja lembaga dipengaruhi oleh kualitas perencanaan yang baik, ketepatan alokasi sumber daya, efektivitas pelaksanaan program kerja, serta kemampuan organisasi dalam menyesuaikan diri terhadap berbagai keterbatasan anggaran yang muncul selama proses pelaksanaan kegiatan.

Konflik Kepentingan

Tidak ada potensi konflik kepentingan yang relevan dengan artikel ini.

Ucapan Terima Kasih

Peneliti menyampaikan apresiasi kepada Ibu Devi Maya Sofa selaku dosen pembimbing, serta mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan Balai POM di Dumai atas kerjasama dan dukungan dalam penelitian ini.

Daftar Pustaka

- Badan POM RI. (2025). *Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Kepka Badan POM RI No. 83 Tahun 2025)*. 1–287.
- Bagiana, I. K. (2023). *Akuntansi Sektor Publik*. Widina Media Utama.
- Balai POM di Dumai. (2026). *Profil Balai POM di Dumai*. <https://dumai.pom.go.id/profil>
- Cahyani, D. D., Amalia, G. S., Putri, J. A., & Zahira, A. A. (2025). Analisis Pengukuran Kinerja Efisien Dan Efektivitas AnggaranBelanja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Periode 2020-2023. *Jurnal Kajian Dan Penalaran Ilmu Manajemen*, 3(1), 61–71. <https://jurnal.aksaraglobal.co.id/index.php/jkpim/article/view/513>
- Darmawan, M., Athalla, M. R. A., Hutasoit, O. B. Y., Cahyadi, R. D., & Lukman, F. (2025). Efisiensi Anggaran dan Dampaknya terhadap praktik Good Governance di Kementerian Dalam Negeri dalam Era Reformasi Birokrasi. *Journal of Social Contemplativa*, 3(1), 12–29. <https://doi.org/10.61183/jsc.v3i1.88>
- Dhamara, R., & Fauzi, A. (2023). Efektivitas Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Kementerian Lembaga. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen Bisnis*, 3(1), 104–110. <https://doi.org/10.56127/jaman.v3i1.666>
- Fitri, S. A., Pangestu, H., Hasanah, K., Fitriana, N., Hijjah, J., Febri, M. P., Berliana, L. P., Arsyad, M., Pratama, A. A., Susanti, E. E., Elfandi, G., Huda, A. M., Waldiana, M., Tanjung, M. F., Reski, M., & Wati, M. M. (2023). *Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*. Sada Kurnia Pustaka.
- Handayani, R., Asih, Q. A., & Pratiw, A. P. (2022). *Akuntansi Sektor Publik*. Universitas Gadjah Mada.
- Jarkasih, M. D. T. R. R. I. (2022). *Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur*. 1–9.
- Judijanto, L., & Afandy, C. (2024). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik* (Vol. 2). Mafy Media Literasi Indonesia.
- Kholifaturrahmah, D. A., Murjana, M., & Arsana, N. (2023). *Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Pada BAPPEDA Dan LITBANG Kabupaten Dompu*. 5(2), 25–33.
- Maulana, A. (2025). *Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2020-2024*.
- Mulyandani, V. C., & Oktaviani, N. R. (2022). *Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Anggaran Belanja Langsung*

Perwakilan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016-2020. 02(02), 484–493.

Purwati, A., Sahusilawane, W., Yanti, L. D., Oktari, Y., Setyowati, L., Ikhyanuddin, Sugianto, Usman, E., Waoma, S., Bakri, A. A., Durya, N. P. M. A., Novianti, R., Nandiroh, U., Sutrisno, C. R., Susanto, E., & Kalsum, U. (2023). *Akuntansi Sektor Publik*. PT Mafy Media Literasi Indonesia.